

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan Indonesia telah memberi peranan yang sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, baik peranan dalam kebijakan moneter, meningkatkan perekonomian masyarakat maupun dalam pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan sebagai lembaga keuangan dengan berbagai fasilitas perbankan dan jasa keuangan sangat dibutuhkan dalam berbagai transaksi- transaksi ekonomi dan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memerlukan dana (debitur) dengan pihak yang kelebihan dana (kreditur).

Menurut UU No.10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pasal yang sama dijelaskan jenis bank di Indonesia dibagi menjadi 2 macam yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Dalam menyusun laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat memiliki standar akuntansi yang berlaku untuk mengukur aktivitas keuangan bank yang telah diatur dan ditetapkan oleh regulator perbankan. Sebelumnya standar akuntansi yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam penyusunan laporan keuangan adalah PSAK 31 (PAPI) tentang akuntansi perbankan, namun standar akuntansi tersebut dipandang tidak sesuai bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) karena transaksinya tidak dibedakan dengan aktifitas bank umum dan memerlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Perkreditan Rakyat memerlukan standar akuntansi yang sesuai dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif dan handal dengan perkembangan transaksi dan harmonisasi sesuai dengan standar akuntansi internasional.

Pada tahun 2009 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, SAK ETAP diperuntukan bagi entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Bank Indonesia memandang SAK ETAP dapat menjadi acuan standar akuntansi bagi Bank Perkreditan Rakyat karena dianggap sesuai dengan kebutuhan Bank Perkreditan Rakyat, sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia menjalankan fungsi regulatornya terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam rencana penerapan sistem akuntansi yang baru, melalui Surat Edaran

BI No. 11/37/DKBU yang dikeluarkan pada 31 Desember 2009 SAK ETAP ditetapkan sebagai standar akuntansi Bank Perkreditan Rakyat sejak 1 Januari 2010.

Terdapat Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan penyajian laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah penerapan SAK ETAP. Menurut Resti Lidiawati (2011), Perbedaan paling mendasar antara SAK ETAP dengan PSAK 31 (PAPI) adalah terdapat pada prinsip penyajian aset, kewajiban atau komponen ekuitas yaitu dalam prinsip pengakuan aset, kewajiban atau komponen ekuitas. Pengakuan yang tidak diakui berdasarkan SAK ETAP mengakibatkan keharusan mereklasifikasikan pos-pos terkait sehingga dalam pengakuannya laporan keuangan tidak boleh mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban apabila SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Seperti yang terlihat dalam penyajian akun antarbank aktiva, SAK ETAP mereklasifikasikan menjadi penempatan pada bank lain. Perbedaan juga terlihat dalam pendapatan bunga yang akan diterima sebelum implementasi SAK ETAP dicatat dalam aktiva lain-lain sedangkan dalam implementasi SAK ETAP disajikan dalam pos tersendiri karena menggambarkan kegiatan utama Bank Perkreditan Rakyat.

Pengakuan aset dan kewajiban bank merupakan hal fundamental dalam hubungannya dengan pengukuran tingkat likuidasi suatu bank. Melalui evaluasi terhadap laporan keuangan terdapat beberapa unsur laporan keuangan yang harus disesuaikan, seperti pengreklasifikasikan unsur-unsur aktiva dan pasiva yang harus disesuaikan dengan SAK ETAP serta penyusunan penyajian laporan keuangan.

Perbedaan pengklasifikasikan ini dapat menghasilkan perhitungan berbeda untuk likuiditas bank. Oleh karena itu, pengklasifikasian ulang aset dan kewajiban merupakan hal penting dalam pengukuran tingkat likuiditas bank, tingkat likuiditas bank menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Dengan demikian pengakuan aset dan kewajiban yang tepat, sesuai dan wajar sangat penting bagi bank tersebut. Tingkat likuiditas adalah salah satu ukuran untuk meningkatkan tingkat kinerja dan kesehatan bank yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia melalui PBI No. 13/1/PBI/2011, yang menyatakan bahwa tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya (Resti; 2011) yang juga membandingkan penyajian laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP. Pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu sampel yang digunakan terdiri dari tujuh Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki kriteria dalam penarikan sampel, yang sebelumnya hanya berfokus pada satu Bank Perkreditan Rakyat (studi kasus).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP, dengan judul “ **Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Sebelum dan Setelah Implementasi SAK ETAP di Bandar Lampung.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlakuan akuntansi sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP pada Bank Perkreditan Rakyat yang difokuskan pada pangakuan pendapatan dan beban bunga serta dampaknya terhadap kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Kinerja keuangan perbankan menggunakan ukuran CAMEL (CAR, NPL, ROA, BOPO dan LDR).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis perbedaan perlakuan akuntansi sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP
2. Membandingkan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat sebelum dan setelah implementasi SAK ETAP.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi perkembangan ilmu akuntansi, dapat menjadi referensi ilmiah tentang analisis atas implementasi SAK ETAP mengenai pendapatan dan beban bunga pada Bank Perkreditan Rakyat.
2. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi dan wawasan.
3. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat membantu manajemen dalam penerapan SAK ETAP.
4. Bagi Akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akademik sebagai tambahan referensi dalam penelitian sejenis di masa mendatang.

